



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN PURWAKARTA**

RENCANA KERJA TAHUN 2022



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Ciganea-Jatiluhur
Telp. (0264) 207908
sekretariatdprdkab.purwakarta@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Sekretariat DPRD, evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun 2021 dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023.

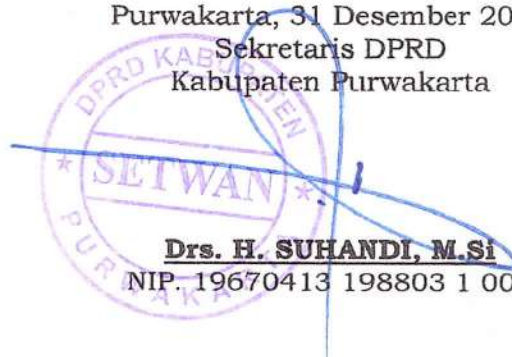
Tersusunnya Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Sekretariat DPRD.

Purwakarta, 31 Desember 2022

Sekretaris DPRD
Kabupaten Purwakarta

Drs. H. SUHANDI, M.Si

NIP. 19670413 198803 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Landasan Hukum.....	4
	1.3. Maksud Dan Tujuan.....	7
	1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	9
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2021 Dan Capaian Renstra SKPD.....	9
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	14
	2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi Sekretariat DPRD.....	16
	2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
	2.5. Penelaahan Usulan Program.....	40
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	42
	3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	42
	3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD.....	43
	3.3. Program Dan Kegiatan.....	46
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD	60
BAB V	PENUTUP	66

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Capaian Kinerja Program Tahun 2021.....	8
Tabel 2.2	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD dan Pencapaian Renstra Sekretariat DPRD s/d Tahun 2021Kabupaten Purwakarta.....	9
Tabel 2.3	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	15
Tabel 2.4	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	18
Tabel 3.1	: Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta	45
Tabel 3.2	: RumusanRencana Program dan Kegiatan Tahun2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta.....	51
Tabel 4.1	: Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2022.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20 tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1 tahun (RKPD).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2021 yang disusun ini merupakan program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan yang mengacu pada rencana strategis (strategic plan report) tahun 2018-2023. Rencana strategis sebagaimana diketahui merupakan rencana umum lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Dengan adanya rencana kerja yang telah tersusun dengan baik diharapkan kinerja organisasi dapat semakin baik dan lebih terfokus. Rencana pembangunan tahunan organisasi perangkat daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai rencana tahunan, Renja OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah

Selanjutnya, setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai pelaksana pembangunan harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD untuk jangka waktu 5 tahun. Renstra PD memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas

dan fungsi PD serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Sebagai penjabaran dari Renstra PD, maka PD membuat rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja (Renja) PD.

Rencana Kerja PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi atas dasar hal tersebut diatas dan untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, perlu sinergi perencanaan tahunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antar pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan menteri dalam negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahun 2022. Utamanya pada sekretariat DPRD Purwakarta, Guna Optimalisasi pelayanan dan fasilitasi terhadap tugas DPRD dalam pencapaian Sasaran dan Tujuan RKPD tahun 2021 maka Renja DPRD Akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana Kegiatan dan anggaran RKA Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun anggaran 2021.

1.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Purwakarta dan Arah Kebijakan Strategis DPRD Kabupaten

Purwakarta yaitu Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Purwakarta tahun 2005-2025 dan memperhatikan visi misi kepala daerah terpilih yang dikampanyekan saat pemilihan umum kepala daerah, maka visi dan misi pembangunan jangka menengah periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Visi

“Mewujudkan Purwakarta Istimewa”

2. Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, pemerintah kabupaten purwakarta menetapkan misi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan social
- Meningkatnya kualitas pendidikan kesehatan dan kesejahteraan social Mewujudkan pembangunan infrastuktur dan pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan yang

berkelanjutan Mewujudkan perekonomian Rakyat Yang berbasis desa

1.1.2. Tujuan dan sasaran sekretariat DPRD

Tujuan adalah suatu cara pandang ke depan , kemana organisasi/ instansi pemerintah akan di bawa dan di arahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipasif, Inofatif serta produktif. Visi merupakan sikap mental model masa depan, dengan demikian visi harus menjadi miliki bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi, sementara itu perencanaan pada unit kerja sekretariat DPRD ditempuh melalui pembahasan dan telaahan yang melibatkan unsur bagia- bagian yang ada dalam lingkungan sekretariat DPRD

1.1.3 Tugas dan Fungsi dan struktur organisasi

Tugas dan fungsi sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta dituangkan dalam susunan organisasi yang mampu menjamin terlaksananya tugas dan fungsi secara efektif dan evesien, susunan organisasi beserta uraian tata kerja yang kompherensif menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi, rentang kendali dan interaksi antara pimpinan dan bawahan, serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD membentuk struktur organisasi sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD membawahi
 - Bagian Umum terdiri atas
 - Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 - Bagian Program dan Keuangan
 - Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
 - Jabatan Fungsional

Setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam penyusunan Renja PD dilakukan pengkajian Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, hasil evaluasi kinerja PD pada tahun sebelumnya, pencapaian target Renstra SKPD, usulan dari masyarakat/para pemangku kepentingan, serta analisis kebutuhan

penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu disusun Renja Tahun 2022.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 yang mendukung Visi dan Misi Bupati Purwakarta sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2023.

Selanjutnya, Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2022, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 untuk selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 164, TLNRI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 139, TLNRI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 21, TLNRI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah agar tersedia dokumen perencanaan tahunan yang memuat uraian rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sesuai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta adalah untuk menjamin konsistensi rencana teknis program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2022 dengan Renstra 2017-2023 yang mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakartadisusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, Review Terhadap Rancangan RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja, serta Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, jumlah anggaran dan indikator kinerja.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dinilai berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program dan kegiatan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta melaksanakan 2 (dua) program dan 15 (Lima Belas) kegiatan yang telah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berdasarkan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja, program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dan program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.

Data hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta yang telah dilaksanakan pada akhir tahun anggaran 2021 dan sampai dengan tahun berjalan atau triwulan III tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini:

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%	100%	100%	100%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									

		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan	14 Bulan			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semestera n SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
019	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100%	75%	75%	75%	75%			
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	100%	88%	100%	88%	88%			

002	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)

024	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
006	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pemeliharaan Mebel	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			
		Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2021	
					Target Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra %
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
		Penyusunan Tata Tertib DPRD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Pembahasan KUA dan PPAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembahasan APBD	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembahasan APBD Perubahan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			
	Pembahasan Laporan Semester	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan			

2.1. Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2022

Memperhatikan pelaksanaan rencana kerja sebagaimana tergambar dari realisasi Anggaran pada Program dan Kegiatan sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021 Sejak Bulan Januari samapai dengan September 2021 dari 2 Program yang di tetapkan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023 belum ada satu program pun yang mencapai target 100%, Kecuali hanya ada 7 Kegiatan dari 14 kegiatan yang ditetapkan, secara keseluruhan capaian atas program dan Kegiatan Terealisasi sebesar Rp. 76 Dari total anggaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebesar Rp. Atau terelisasi . ini berarti realisasi pencapaian target kinerja yang direncanakan masih belum mencapai target sebagaimana telah ditetapkan dalam renstra 2018-2023

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Tahun 2022

No.	Program	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.983.300	21.640.500	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.032.409.787	3.981.235.311	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.115.652.000	655.595.956	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.492.713.100	2.808.104.212	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1.173.296.200	980.713.600	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	3.146.590.304	1.601.661.913	
7	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	882.700.000	717.995.020	
8	layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	31.666.606.618	20.201.476.549	
9	Layanan Administrasi DPRD	495.000.000	408.930.000	
10	pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD	7.136.618.300	3.767.658.513	
11	pembahasan Kebijakan Anggaran	1.423.353.350	374.953.830	
12	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	486.020.000	154.100.000	
13	Peningkatan Kapasitas DPRD	3.774.559.600	2.762.417.223	

14	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.423.692.900	2.181.006.450	
15	Fasilitasi Tugas DPRD	9.575.154.150	5.613.213.332	

1. Capaian tertinggi program Pelayanan Administrasi perkantoran sesungguhnya pada kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, yaitu sebesar 99,61%. Sedangkan capaian kegiatan paling rendah kegiatan Penyediaan surat Menyurat yaitu sebesar 0 %.

2. Capaian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terdiri dari 11 kegiatan, masih dibawah target Renstra Tahun 2021 yang ditetapkan 100% atau hanya terealisasi 83,12% dengan rincian kegiatan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Capaian Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13.539.100	11.165.000	97,93%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17.444.200	10.475.500	100%
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.835.062.287	3.885.627.311	97,73%
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan /Semesteran SKPD	197.347.500	95.608.000	99,73%
5.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	329.000.000	216.840.000	91,83%
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	486.652.000	366.915.956	99,68%
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300.000.000	198.660.000	98,68%
8.	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35.832.000	35.560.000	95,65%
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.346.575.350	1.291.671.000	0%
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.672.312.500	1.321.293.000	99,79%
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	86.500.000	86.100.000	
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi	85.120.000	73.480.212	

	SKPD			
13	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	1.173.296.200	980.713.600	
14	Penyediaan Jasa Surat menyurat	6.000.000	6.000.000	
15	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	350.135.000	259.724.893	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.790.455.304	1.335.937.020	
17	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	232.700.000	129.206.020	
18	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	100.000.000	39.686.000	
19	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	550.000.000	549.103.000	
20	Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD	31.156.606.618	19.810.651.549	
21	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	450.000.000	331.425.000	
22	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	60.000.000	59.400.000	
23	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	495.000.000	408.930.000	

Tabel 2.3

Capaian Program dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

No	Nama Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Prosentase Capaian
1.	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	485.841.250	297.929.920	
2.	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.385.497.100	2.726.353.143	
3.	Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan	473.977.450	241.155.450	
4.	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan atau Naskah Akademik	791.302.500	502.220.000	
5.	Pembahasan KUA Dan PPAS	248.800.750	186.786.300	
6.	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	238.981.150	0	
7.	Pembahasan APBD Perubahan	453.248.250	0	
8.	Pembahasan Laporan Semester	252.397.000	188.167.530	
9.	Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	229.926.200	0	
10.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Pemerintaha dan Hukum	121.505.000	37.055.000	

11.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	121.505.000	44.265.000	
12.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	121.505.000	36.015.000	
13.	Pengawasan urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	121.505.000	36.765.000	
14.	Pendalaman Tugas DPRD	1.812.350.000	1.342.385.223	
15.	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.176.650.000	916.032.000	
16.	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	360.456.600	252.000.000	
17.	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	425.103.000	252.000.000	
18.	Pelaksanaan Reses	4.423.692.900	2.181.006.450	
19.	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	6.409.904.900	4.162.088.519	
20.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	946.145.150	298.978.585	
21.	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	2.219.104.100	1.152.146.228	

1. Capaian tertinggi Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Sesungguhnya pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Yaitu Sebesar 99.73% Sedangkan
2. Capaian Kegiatan Terendah ada Pada kegiatan pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Yaitu Sebesar 77.83%
3. Capaian Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari kegiatan, masih dibawah target renstra tahun 2020 yang ditetapkan 100% atau Realisasi 91.59% dengan Rincian Kegiatan pada tabel Berikut
4. Capaian tertinggi program Peningkatan Disiplin Aparatur pada kegiatan Pengadaan Pengadaan Pakaian dinas Sipil Lengkap beserta Perlengkapannya, yaitu sebesar 95,62%.
5. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur hanya 1 kegiatan, masih dibawah target Renstra Tahun 2020 yang ditetapkan 100% atau hanya terealisasi sebesar Rp.0,- dari total anggaran program Rp8.000.000,- atau terealisasi 0% pada kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, yakin:
6. Capaian tertinggi program Peningkatan Perkembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan pada kegiatan Penyusunan Renja, yaitu sebesar 100%.
7. Capaian Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari kegiatan, masih dibawah target Renstra Tahun

2020 yang ditetapkan 100% atau dengan rincian kegiatan pada tabel pengikut :

8. Capaian tertinggi program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sesungguhnya pada kegiatan Penyediaan bahan Pistaka, yaitu sebesar 99,32%. Sedangkan capaian kegiatan terendah adalah kegiatan sosialisasi Raperda dan Produk Hukum Yaitu 0%.

2.1.2 Faktor – faktor penyebab tidak tercapaian target

Beberapa penyebab tidak tercapainya target atas pelaksanaan program/kegiatan, diantaranya adalah :

1. Efisiensi penggunaan anggaran dan hasil negoisasi melalui proses pengadaan barang dan jasa
2. Pelaksanaan kegiatan sekretariat DPRD dan fasilitasi yang dilaksanakan sangat tergantung dengan agenda pimpinan dan anggota dewan hasil saran pertimbangan yang di sepakati oleh badan musyawarah DPRD, sehingga dinamika kegiatan dewan yang sangat cepat dan dapat ditambah sering kali terjadi perubahan agenda kegiatan Dewan sewaktu waktu
3. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia/pegawai terutama di jajaran para pelaksana yang berkompeten dan ahli dalam bidangnya termasuk masih lemah dan belum di pahami sistem pengelolaan keuangan oleh para pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
4. Pelaksanaan kegiatan yang sangat hati- hati dan masih adanya keraguan yang muncul dalam pengelolaan kegiatan
5. Mutasi pegawai dan pergatian pucuk kepemimpinan yang terjadi ditengah tahun berjalan dan memunculkan persepsi kebijakan baru
6. Target capaian program/kegiatan yang ada dalam renstra masih kurang tepat dan perlu dilakukan perbaikan kedepannya. Seharusnya target yang di maksud dapAnalisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2008 mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas, pokok, fungsi sebagai fasilitator kesekretariatan kedewanan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan Kualitas Tata Kerja Sekretariat DPRD. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD selaku fasilitator kegiatan kedewanan di lingkup Pemerintah Kabupaten purwakarta harus mampu menjadi institusi pelayanan yang profesional, netral dan berwibawa dalam upaya menjawab berbagai perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan partisipatif dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan. Dari tujuan yang telah ditetapkan, sasaran yang ingin diwujudkan sebagai berikut:

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;

- Meningkatkan pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan;
- Meningkatkan akuntabilitas dan kapabilitas Aparatur Sekretariat DPRD.
- Adapun indikator dari sasaran tersebut adalah sebagai berikut:
- Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti
- Nilai LAKIP
- Persentase BMD dalam Keadaan Baik.

2.2 Analisis kinerja Pelayanan

Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah, pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil manfaat dan dampak dengan kata lain, pengukuran kinerja didahului dengan tahapan penetapan indikator kinerja dengan pengertian sebagai berikut:

1. Masukan input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output
2. keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan yang digunakan

3. hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran yang dirasakan langsung oleh masyarakat
5. Dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Tabel 2.3 (T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD			100%	100%	100%	100%	93,10%	100%	100%	100%	
2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Nilai AKIP			65	65	70	70	59,37	62,21	65	67,5	
4	Persentase BMD dalam Kondisi Baik			80%	80%	80%	80%	98,50%	92,34%	95%	98%	

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sampai dengan Tahun 2022, Sekretariat DPRD dihadapkan pada berbagai permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat kegiatan yang belum optimal realiasi capaian kinerjanya, dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19.
2. Capaian kinerja lebih rendah daripada realisasi anggaran dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang sudah ada realisasi anggarannya namun kinerjanya belum tercapai penuh.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelaksanaan renja Tahun 2022, maka solusi yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan secara optimal berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan dan sesuai dengan alokasi anggaran dalam DPA dengan memperhatikan realisasi kinerja ditengah pandemi Covid- 19;
2. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.

Adapun isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta antara lain:

1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan;
2. Banyak kegiatan yang terfokus di akhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada;
3. Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan dan ketersediaan dana cash budget dalam SIMDA;
4. Banyak aspirasi yang masuk ke lembaga DPRD yang harus dipertimbangkan dalam menentukan arah kebijakan.

Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan program dan kegiatan yang telah disetujui di dalam pelaksanaan

APBD tahun 2021, beberapa usulan yang diajukan di dalam rancangan awal RKPD tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rancangan awal RKPD tahun 2022, Sekretariat DPRD melakukan analisis terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Analisis yang dilakukan merupakan estimasi volume kegiatan dan dana yang dibutuhkan. Analisis kebutuhan diperlukan sebagai langkah antisipasi agar program dan kegiatan yang direncanakan dapat terakomodir seluruhnya dalam dokumen RKPD baik jumlah program/kegiatan, volume, maupun dana yang dibutuhkan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.4 (T-C.31)

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4	02				SEKRETARIAT DPRD									
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
4	02	01	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang Diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya dokumentasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	24 Dokumen	24 Dokumen	13.539.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,01	6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Diselesaikan Tepat Waktu	Tersedianya dokumentasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	24 Dokumen	24 Dokumen	17.444.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
4	2	1	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	2	1	2,02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP PD	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	12 Bulan	39 Laporan	6.835.062.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,02	2	Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	35 Dokumen	39 Laporan	197.347.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4	2	1	2,05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	1 Laporan	39 Laporan	329.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	2 Laporan	39 Laporan	486.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	1 Laporan	39 Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
---	---	---	------	----	--	---------------	--	---	------------------------------	----------	-----------	------------	-------------	--

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kecamatan Jatiluhur, Ciganea				35.832.000	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Waktu		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea					
4	2	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Diselesaikan tepat waktu	Tersedianya dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	2 Laporan	39 Laporan	1.672.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	1	2,06	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Nilai AKIP PD	Jumlah Penerimaan Surat Masuk dan Pembuatan Surat Keluar	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	450 Surat	12 Bulan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	12 Bulan	12 Bulan	306.140.815,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021									
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan						
4	2	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										
4	2	1	2,07	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah Bulan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	12 Bulan	12 Bulan	1.173.296.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,08	Penyediaan jasa penunangan urusan pemerintahan daerah										

4	2	1	2,08	1	Penyediaan jasa surat menyurat	Nilai AKIP PD	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor (Meliputi Penyediaan Alat Kebersihan)	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	12 Bulan	12 Bulan	6.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,08	2	Pemnyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Peralatan Kerja yang Diservis/Diperbaiki	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	11 Jenis	12 Bulan	350.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,08	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantnror	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	75 Jenis	12 Bulan	2.790.455.304,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah									
4	2	1	2,09	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	20 Jenis	12 Bulan	232.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
4	2	1	2,09	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	14 Jenis	12 Bulan	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,09	11	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	28 Jenis	12 Bulan	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,15		Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD									
4	2	1	2,15	1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD									
4	2	1	2,03	2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Nilai AKIP PD	Jumlah Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	2 Kegiatan	12 Bulan	450.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,03	3	Pelaksanaan medical check up DPRD	Nilai AKIP PD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	4 unit	12 Bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2021						
					Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana	
									Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
4	2	1	2,16		Layanan administrasi DPRD									
4	2	1	2,16	3	Fasilitasi rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang Dibeli	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	1 Jenis	12 Bulan	495.000.000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Khusus
4	2	2	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD									
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Nilai AKIP PD	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%		12 Bulan	485.841.250	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Khusus
4	2	2	2.01	2	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Nilai AKIP PD	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Lapran Kegiatan	12 Bulan	5.385.497.100	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Khusus

4	2	2	2.01	3	Penyelenggara kajian perundang-undangan	Nilai AKIP PD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Laporan Kegiatan	12 Bulan	473.977.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
---	---	---	------	---	---	---------------	---	-------------------------------------	------------------------------	------	------------------	----------	-------------	--

4	2	2	2.01	4	Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik	Nilai AKIP PD	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor yang Dipelihara secara Berkala	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	5 Jenis	12 Bulan	791.302.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,02	Pembahasan kebijakan anggaran										
4	2	1	2,02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Nilai AKIP PD	Jumlah Mobil Jabatan yang Direhabilitasi	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bulan	248.800.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,02	2	Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Nilai AKIP PD	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Direhabilitasi	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bulan	238.981.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	1	2,02	4	Pembahasan APBD perubahan	Nilai AKIP PD	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang Dibeli	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bulan	453.248.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,02	6	Pembahasan penanggung jawaban APBD	Nilai AKIP PD	Jumlah Pakaian Kerja Lapangan	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%		12 Bulan	229.925.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	1	2,04	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan										
4	2	1	2,03	1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Nilai AKIP PD	Jumlah Pakaian Hari-hari Tertentu	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%		12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,03	10	Pengawasan urusan pemerintahan bidang insfaraktuktur	Nilai AKIP PD	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus
4	2	1	2,04	11	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Nilai AKIP PD	Jumlah Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya rata-rata Capaian SKP ASN diatas >=80%	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	kegiatan	12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus

4	2	2	2,01	1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Administrasi, Ketatausahaan Dan Kepegawaian DPRD	Terpenuhinya Administrasi DPRD	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bulan	121.505.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	2	2,01	2	Peningkatan kapasitas DPRD				Kecamatan Jatiluhur, Ciganea					

4	2	2	2,01	6	Pendalaman tugas DPRD	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Terpenuhinya Administrasi DPRD	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokumen	1 Tahun	1.812.390.000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	1	2,02	1	Publikasi dan dokumentasi dewan	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terpenuhinya Kesejahteraan DPRD	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	275 Stel	1 Tahun	617.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

4	2	1	2,02	3	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Persentase Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up	Terpenuhi nya Kesejahteraan DPRD	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	55 Orang	1 Tahun	102.850.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
---	---	---	------	---	--	---	--	----------------------------------	------------------------------	------	----------	---------	----------------	------------------------------

4	2	3	2,01	1	Penyediaan tenaga ahlin fraksi	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	7 orang	Laporan	#####	7 orang	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea
4	2	3	2,01	2	Penyerapan dan pengumpulan aspirasi masyarakat									Kecamatan Jatiluhur, Ciganea
4	2	3	2,01	3	Pelaksanaan reses	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan yang Diselenggarakan	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea

4	2	3	2,0 1	4	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen Naskah Akademik yang Disusun	Terselenggaranya Penataan Peraturan Perundang-undangan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokumen Kegiatan	12 bulan	8.409.904.900	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea
4	2	3	2,0 2	1	fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Ditetapkan	Terlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokumen	1 Tahun	946.145.150	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
4	2	3	2,0 2	2	Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah Dokumen KUPA dan PPAS Perubahan yang Ditetapkan	Terlaksananya Pemenuhan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	95%	Dokumen	1 Tahun	2.219.104.100	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka SKPD menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses partisipatif, proses bottom-up dan top down. Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Realisasi usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) diusahakan dapat tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Musrenbang ini merupakan salah satu wahana yang memungkinkan setiap anggota masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses perencanaan pembangunan, yaitu bersama-sama pemerintah membuat konsep, merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memelihara hasil pembangunan sesuai prinsip-prinsip pembangunan partisipatif. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan musrenbang diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas dimana realisasi kebutuhan masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tahapan-tahapan musrenbang sendiri meliputi Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum PD serta Musrenbang Tingkat Kota/Kabupaten. Pada tahap Forum PD, usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat akan disinkronkan dengan usulan masing-masing PD terkait.

Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, Renstra serta isu-isu strategis yang sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Renja PD yang nantinya Renja tersebut dibahas dalam forum PD yang dikoordinasi oleh Bappeda. Tujuan dari pembahasan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi

pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pada tahun 2022 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau dari masyarakat Kabupaten Purwakarta untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

No	Usulan Program/ Kegiatan	Pagu Anggaran
	NIHIL	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia memiliki modal dan potensi yang sangat besar, baik sumber daya alam, letak geografis yang strategis, struktur demografi penduduk yang ideal, keragaman budaya dan sumber daya manusia yang memiliki potensi dan kreativitas yang tidak terbatas. Hal tersebut merupakan dasar untuk mewujudkan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi, antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran dan target pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024, Pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam RPJMD Tahun 2018-2023 telah menetapkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menjadi rujukan dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Purwakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD

Kabupaten Purwakarta mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
5. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang berjalan dengan baik akan berdampak pada perwujudan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta.

□ Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD mempunyai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang memiliki peran penting untuk dapat mewujudkan visi Mewujudkan Purwakarta Istimewa dan misi Kabupaten Purwakarta . Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Purwakarta, Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta menentukan tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD. Pada RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023, Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan Misi ke-5 (lima), yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Adapun Tujuan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan misi Kabupaten Purwakarta tersebut adalah “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Efektif”.

Dengan tujuan tersebut Sekretariat DPRD diharapkan mampu memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Purwakarta dalam

melaksanakan tri fungsi DPRD yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Anggaran, dan Fungsi Pengawasan.

Berdasarkan tujuan strategis tersebut di atas, maka sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023 yang ingin dicapai adalah Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintah umum yang baik dan Efektif

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan efektif	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum baik dan Efektif	Capaian Sakip PD Persentase Fasilitasi Kegiatan Rapat DPRD
		Persentase Pemenuhan Dukungan Manajemen Perkantoran
		Persentase Penyusunan Risalah Rapat
		Persentase Referensi Perundang-Undangan

3.1 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan Kabupaten Purwakarta, maka pada Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta melaksanakan 2 program, 15 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 76.391.422.024,- dengan rincian sebagai berikut: program/kegiatan penunjang urusan Pemerintah/kota Rp.48.879.578.724 dan Prpgram/Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp 27.511.843.300

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

A. Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

- ✓ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan ikhtisiar realisasi Kinerja SKPD

B. Administrasi Keuangan

- ✓ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ✓ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- ✓ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut Kelengkapannya
- ✓ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ✓ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- ✓ Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- ✓ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- ✓ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- ✓ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- ✓ Penyelenggaraann Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- ✓ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- ✓ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik
- ✓ Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor
- ✓ Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
- ✓ Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan jabatan
- ✓ Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya
- ✓ Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

E. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

- ✓ Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- ✓ Penyediaan Pakaian dinas dan atribut DPRD
- ✓ Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

F. Layanan Administrasi DPRD

- ✓ Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ✓ Program dukungan Pelaksanaan dan Fungsi DPRD
- ✓ Pembentukan peraturan daerah dan DPRD
- ✓ Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- ✓ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- ✓ Penyelenggaran kajian Perundang- Undangan
- ✓ Pasilitasi Penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik
- ✓ Pembahasan Kebijakan Anggaran
- ✓ Pembahasan KUA dan PPAS
- ✓ Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- ✓ Pembahasan APBD Perubahan
- ✓ Pembahasan Laporan Semester
- ✓ Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD
- ✓ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastuktur
- ✓ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat

- ✓ Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Perekonomian

G. Peningkatan Kapasitas DPRD

- ✓ Pendalaman Tugas DPRD
- ✓ Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- ✓ Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

H. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- ✓ Pelaksanaan Reses

I. Fasilitasi Tugas DPRD

- ✓ Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- ✓ Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

- ✓ Pengawasan Urusan pemerintahan Bidang Perekonomian

G. Peningkatan Kapasitas DPRD

- ✓ Pendalaman Tugas DPRD
- ✓ Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- ✓ Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

H. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- ✓ Pelaksanaan Reses

I. Fasilitasi Tugas DPRD

- ✓ Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
- ✓ Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
- ✓ Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Tabel 3.2 (T-C.33)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023								
		Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (RP)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp).				
						Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target					
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN													
4	2				SEKRETARIAT DPRD				76.391.422.024									
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH													
4	2	1	2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
4	2	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokume nt	Tersedia nya dokume nt	Kecamat an Jatiluhu r, Ciganea		24 Dokum en	24 Dokum en	13.539.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	91.285.100
4	2	1	2	6	Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokume nt Evaluasi Kinerja	Tersedia nya dokume nt	Kecamat an Jatiluhu r, Ciganea		Dokum en	Dokum en	17.444.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	7.625.000

4	2	1	2	Administrasi Keuangan														
4	2	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Nilai AKIP PD	Jumlah Pembayaran Gaji ASN	Tersedia nya 12 Bulan Gaji Pegawai	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea				6.835.062.287	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	6.835.544.097
4	2	1	2	2	Koordinasi dan Penyusunan Keunganan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Nilai AKIP PD	Jumlah Dokumen	Tersedia nya dokumen Laporan Keuangan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Point	Dokumen	Laporan	197.347.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	56.258.000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																		
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	72.000.000
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan	Tersedia nya dokumen anggaran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	Point	Laporan	Laporan	486.652.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	350.000.000
4	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan	Tersedia nya dokumen Kegiatan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	1 Laporan	Laporan	300.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	

Administrasi Umum Perangkat Daerah																	
4	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kecamatan Jatiluhur, Ciganea				35.832.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	Nilai AKIP PD	70 Point	50.600.800
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Waktu		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea				1.346.575.350	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus	Nilai AKIP PD	70 Point	144.871.300
4	2	1	2.06	4	Penyediaan bahan logistik kantor	Nilai AKIP	Jumlah Laporan Keuangan	Tersedia nya	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea		Lapora	Laporan	1.672.312.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus			1.790.772.310
4	2	1	2,1	5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Nilai AKIP PD	Jumlah Laporan	Tersedia nya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea		Surat	12 Bulan	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus			145.500.000
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Nilai AKIP PD	Laporan Kegiatan	Tersedia nya laporan kegiatan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	12 Bulan	12 Bulan	306.140.815,00				-

					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
4	2	1	2,1	6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai AKIP PD			Kecamatan Jatiluhur, Ciganea		12 Bulan	12 Bulan	1.173.296.200					390.999.300
					Penyediaan jasa penunangan urusan pemerintahan daerah													
4	2	1	2,1	2	Pemnyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Nilai AKIP PD			Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%		12 Bulan	350.135.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	450.024.190
4	2	1	2,1	4	Penyediaan jasa pelayanan umum kantnor	Nilai AKIP PD			Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%		12 Bulan	2.790.455.304	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	2.995.862.904
					Pemeliharaan barang milik daerah penunangan urusan pemerintahan daerah													
4	2	1	2,1	1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Nilai AKIP PD	Pemeliharaan kendaraan Dinas	Tersedianya Operasional Perkantoran	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	14 Jenis	12 Bulan	232.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	290.900.000

4	2	1	2,1	6	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%		12 Bular	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	254.550.000
4	2	1	2,1	11	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Nilai AKIP PD	Jumlah		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%		12 Bular	550.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	350.000.000
					Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD													
4	2	1	2,2	1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD						Gaji dan tunjangan gaji DPRD	12 Bular	31.196.605.618	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	33.410.007.080
4	2	1	2	2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Nilai AKIP PD	Tersedia Pakaian Dinas DPRD	Laporan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bulan	450.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	155.000.000
4	2	1	2	3	Pelaksanaan medical check up DPRD	Nilai AKIP PD		Tersedia Layanan kesehatan DPRD	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	70 Point	45 anggota DPRD	12 Bulan		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD	70 Point	60.000.000
					Pembahasan kebijakan anggaran													
4	2	1	2	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Pasilitasi Rapat-Rapat DPRD	Dokumen APBD		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bular	248.800.750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi		Nilai AKIP PD	70 Point	232.432.750

4	2	1	2	2	Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS		Dokumen APBD	Laporan Kegiatan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bular	238.981.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	247.351.750
4	2	1	2	4	Pembahasan APBD perubahan		Dokumen APBD		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bular	453.248.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	134.895.750
4	2	1	2	5	Pembahasan laporan semester	Fasilitas Rapat-Rapat DPRD	Laporan Kegiatan	Dokumen	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokumen	12 Bular	252.397.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	446.320.750
	2	1	2	6	Pembahasan penanggung jawaban APBD		Jumlah Laporan Kegiatan	Dokumen	Kecamatan	100%		12 Bular	229.925.200	Dana Transfer Umum-Dana		Nilai AK	70 Point	251.148.000
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan penyelenggaraan pemerintahan																		
4	2	1	2	38	Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Nilai AKIP PD	Jumlah Rehabilitasi Rumah Gedung Kantor	Tersedia nya Operasional Perkantoran		70 Point	3 Paket	12 Bular	203.971.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	121.505.000
4	2	1	2	10	Pengawasan urusan pemerintahan bidang insfaraktuktur		Jumlah Kegiatan		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bular	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	203.971.500

4	2	1	2	11	Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat	Fasilitas Rapat-Rapat DPRD	Jumlah Kegiatan		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Kegiatan	12 Bulan	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AK	70 Point	203.971.500
4	2	2	2	1	Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian		Jumlah Kegiatan		Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokume	1 Tahun	121.505.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus				203.971.500
Peningkatan kapasitas DPRD																		
4	2	2	2	6	Pendalaman tugas DPRD	Fasilitas Rapat-Rapat DPRD		Bintek Anggota DPRD	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokume	1 Tahun	1.812.390.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD		2.131.469.500
4	2	1	2	1	Publikasi dan dokumentasi dewan	Fasilitas Rapat-Rapat DPRD	Jumlah Dokument	Publikasi Kegiatan	Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%	Dokume	1 Tahun	1.175.650.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus		Nilai AKIP PD		852.929.300
4	2	1	2	3	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli				Kecamatan Jatiluhur, Ciganea	100%		1 Tahun	366.456.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus				495.816.000
4	2	3	2	1	Penyediaan tenaga ahlin fraksi	Fasilitas RapatRapat DPRD	Jumlah Dokument		Kecamatan Jatiluhur,		7 orang	Laporan	425.103.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus				420.000.000

Penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat																		
4	2	3	2	3	Pelaksanaan reses	Fasilitas i rapat Rapat DPRD	3 Kegiatan	Dokume n	Kecamat an Jatiluhu r	100%	Dokum en	Laporan Kegiatan	4.423.692.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus				6.539.316.000
					fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tugas badan musyawarah	Fasilitas i Rapat- Rapat DPRD	Jumlah dokume n banmus	Terlaksa naya banmus					946.145.150	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus				1.679.466.600
					Fasilitasi tugas pimpinan DPRD	-	Jumlah fasilitas i pimp	Terlaksa nanya pimp					2.219.104.100	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Khusus				2.350.990.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023. Renja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022

Rencana Kerja merupakan acuan setiap Perangkat Daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan.

Rencana kerja program dan kegiatan serta pagu indikatif Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta

		Sekretariat DPRD					76.391.422.024	69.475.138.227	90,95
	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Opini	A	A	48.879.578.724	44.960.616.040	91,98
			Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran	%	100,00	100,00			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase	100	100	30.983.300	21.640.500	69,85
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja Perangkat daerah	Dokumen	2	2	13.539.100	11.165.000	82,46
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dokumen	1	1	17.444.200	10.475.500	60,05

			SKPD						
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase	100	100	7.032.409.787	5.772.704.651	82,09
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	14	14	6.835.062.287	5.597.369.151	81,89
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan	Dokumen	1	1	197.347.500	175.335.500	88,85
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase	100	100	1.115.652.000	1.081.285.236	96,92
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, tersedianya pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, tersedianya pengadaan pakaian korpri	Bulan	12	12	329.000.000	326.490.000	99,24

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Formal	Persen	100%	100%	486.652.000	456.805.236	93,87
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Peraturan Perundang-undangan	Bulan Paket	12 Bulan 6 Paket	12 Bulan 6 Paket	300.000.000	297.990.000	99,33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase	100	100	3.226.339.850	3.206.024.312	99,37
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	12	12	35.832.000	35.560.000	99,24
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya penyediaan Alat Tulis Kantor, tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	Dokumen	12	12	1.346.575.350	1.341.522.000	99,62
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya penyediaan Makanan dan Minuman	Dokumen	12	12	1.672.312.500	1.657.958.000	99,14

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dokumen	12	12	86.500.000	86.100.000	99,54
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Dokumen	12	12	85.120.000	84.884.312	99,72
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase	100	100	1.173.296.200	1.130.813.600	96,38
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya pengadaan peralatan gedung kantor	Bulan	12	12	1.173.296.200	1.130.813.600	96,38
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase	100	100	3.256.590.969	2.883.757.805	88,55
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Bulan	12	12	6.000.000	6.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	12	12	460.135.665	415.390.485	90,28

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa Administrasi keuangan, tersedianya jasa kebersihan kantor	Bulan	12	12	2.790.455.304	2.462.367.320	88,24
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase	100	100	882.700.000	860.447.335	97,48
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional, tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	Bulan	12	12	232.700.000	211.404.335	90,85
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksanya pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor, terlaksanya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Bulan	12	12	100.000.000	99.940.000	99,94

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor, terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor DPRD	Bulan	12	12	550.000.000	549.103.000	99,84
	layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Prosentase	100	100	31.666.606.618	29.509.542.601	93,19
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Gaji dan Tunjangan DPRD	Bulan	14	14	31.156.606.618	29.007.117.601	93,10
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Persen	100%	100%	450.000.000	443.025.000	98,45
	Pelaksanaan Medical Chek Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Persen Orang	100 Persen 45 Orang	100 Persen 45 Orang	60.000.000	59.400.000	99,00
	Layanan Administrasi DPRD					495.000.000	494.400.000	99,88
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Fasilitasi Rapat DPRD	Bulan	12	12	495.000.000	494.400.000	99,88

	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan referensi perundang-undangan	Persen	100,00	100,00	27.511.843.300	24.514.522.187	89,11	
			Perentase fasilitasi kegiatan rapat DPRD	Persen	100,00	100,00				
				Persentase penyusunan risalah rapat	Persen	100,00	100,00			
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase	100	100	7.136.618.300	5.957.327.112	83,48
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya penyusunan dan pembahasan Program dan pembentukan Peraturan Daerah, tersedianya Rapat-rapat DPRD	2 Dokumen 10 Bulanj	2 Dokumen 10 Bulanj	2 Dokumen 10 Bulanj	485.841.250	396.459.560	81,60
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Tersedianya pembahasan Rancangan Perda	21 Dokumen 10 Bulan	21 Dokumen 10 Bulan	21 Dokumen 10 Bulan	5.385.497.100	4.417.952.052	82,03
			Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Tersedianya penyelenggaraan kajian perundang	12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	12 Dokumen 12 Bulan	473.977.450	371.565.200	78,39

		undangan							
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Tersusunnya Dokumen Naskah Akademik	6 Dokumen 12 Bulan	6 Dokumen 12 Bulan	6 Dokumen 12 Bulan	791.302.500	771.350.300	97,48
		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase	100	100	1.892.298.350	1.211.542.557	64,02
		Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksanannya pembahasan KUA dan PPAS	Kegiatan	6	6	717.745.750	611.557.610	85,21
		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksana pembahasan KUA dan PPAS Perubahan	Kegiatan	1	1	238.981.150	204.596.657	85,61
		Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	Kegiatan	1	1	453.248.250	0	-
		Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semesteran	Kegiatan	1	1	252.397.000	194.967.530	77,25
		Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggung jawaban DPRD	Kegiatan	1	1	229.926.200	200.420.760	87,17

	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase	100	100	486.020.000	284.038.700	58,44
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	Bulan	12	12	121.505.000	72.914.500	60,01
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	Bulan	12	12	121.505.000	76.931.500	63,32
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Bulan	12	12	121.505.000	70.796.500	58,27
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Tersedianya pengawasan urusan pemerintah bidang perekonomian	Bulan	12	12	121.505.000	63.396.200	52,18
	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase	100	100	3.998.059.600	3.835.784.035	95,94

	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Persen	100%	100%	1.812.350.000	1.670.502.035	92,17
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Tersedianya Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Bulan	12	12	1.244.150.000	1.229.282.000	98,80
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Persen	100%	100%	432.456.600	432.000.000	99,89
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Persen	100%	100%	509.103.000	504.000.000	99,00
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase	100	100	4.423.692.900	4.309.002.900	97,41
	Pelaksanaan Reses	Tersedianya pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD	2 Kegiatan 6 Dapil	2 Kegiatan 6 Dapil	2 Kegiatan 6 Dapil	4.423.692.900	4.309.002.900	97,41
	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase	100	100	9.575.154.150	8.916.826.883	93,12
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Bulan	12	12	6.409.904.900	5.918.192.447	92,33

		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Badan Musyawarah	Tersedianya Undangan DPRD	Bulan	12	12	946.145.150	941.025.533	99,46
		Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Tersedianya koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Bulan	12	12	2.219.104.100	2.057.608.903	92,72

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan pada Setiap Semester (Semester I dan Semester II) sebagai bahan penyusunan KUPA-PPAS/R-APBDP Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.

Renja sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan melalui perencanaan kegiatan yang berkualitas. Renja ini diharapkan mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sekretariat DPRD Kota purwakarta pada tahun 2022 dan sebagai pengukur rencana capaian kinerja organisasi.

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 bertujuan untuk meningkatkan dan mencapai perencanaan kegiatan berkualitas. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran kinerja yang tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta tahun 2018-2023 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Sekretariat DPRD tahun 2022, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar Bagian mengingat pewartuan serta pencapaian indikator kinerja.
2. Renja Sekretariat DPRD tahun 2022, menjadi dasar bagi penyusunan perubahan RKAP/DPPA Sekretariat DPRD serta pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Rencana Kerja tahun 2022 merupakan refleksi dari asumsi ketercapaian indikator kinerja dengan memperhatikan evaluasi

penganggaran tahun sebelumnya, guna mengantisipasi hal-hal yang perlu dilaksanakan dalam mewujudkan konsistensi perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dapat diketahui asumsi-asumsi pencapaian keberhasilan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023.

Akhir kata, semoga Rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi.